



Menakar Partisipasi Politik Lokal: Studi Pemilihan Kabupaten Mappi Pada Pilkada Tahun 2024

Viktor Auparai¹, Bonefasius Bao², Anitha Nurak³, Hendry Bakri⁴

¹KPU Kabupaten Mappi, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Sain dan Teknologi Jayapura, Indonesia

E-mail: jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-13	This research aims to determine the level of community participation in the 2024 Mappi Regency Head and Deputy Head Elections and to analyse the factors influencing it. Community participation is an important indicator in measuring the quality of local democracy, particularly in the context of regional head election administration. This study employs a quantitative approach using surveys with 398 respondents distributed across several districts in Mappi Regency. Data was collected through questionnaires and analysed descriptively. The research results indicate that the level of community participation reached 78,4%, which falls into the high category. Several factors have been shown to influence this level of participation, including: education level, access to political information, the role of local and religious leaders, trust in the election organiser (the Mappi district KPU), distance to the polling station, political interest and awareness, as well as the effectiveness of election socialisation by the KPU. The most dominant factor in encouraging participation is trust in the election organisers and the role of local/religious leaders who have strong social influence in the community. This research concludes that community participation in the Mappi Regency 2024 election is fairly good, but still needs to be improved through more inclusive socialisation strategies, enhancement of electoral information quality, and strengthening collaboration between the Election Commission and local figures.
Keywords: <i>Political Participation; Regional Elections; Community; Election Commission; Mappi Regency.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-13	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi lokal, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 398 responden yang tersebar di beberapa distrik di Kabupaten Mappi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mencapai 78,4%, yang tergolong dalam kategori tinggi. Beberapa faktor yang terbukti memengaruhi tingkat partisipasi tersebut antara lain: tingkat pendidikan, akses informasi politik, peran tokoh adat dan agama, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Mappi), jarak ke TPS, minat dan kesadaran politik, serta efektivitas sosialisasi pemilu oleh KPU. Faktor yang paling dominan dalam mendorong partisipasi adalah kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan peran tokoh adat/agama yang memiliki pengaruh sosial yang kuat di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mappi 2024 cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui strategi sosialisasi yang lebih inklusif, peningkatan kualitas informasi pemilu, dan penguatan kolaborasi antara KPU dengan tokoh-tokoh lokal.
Kata kunci: <i>Partisipasi Politik; Pilkada; Masyarakat; KPU; Mappi.</i>	

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Mappi adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kepi, distrik Obaa. Jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 114.153 jiwa. Luas wilayah mencapai 28.518 km², terletak di antara 06°28' - 56°4' LS dan 139°2' - 11°0' BT. Terbagi menjadi 15 Distrik, 164 kampung, dan 1 kelurahan, dengan Kepi

sebagai ibu kota kabupaten. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 - 100 m dpl. Sekurang-kurangnya ada 14 sungai yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi atau penghubung antar distrik.

Secara administratif berada di Provinsi Papua Selatan, turut menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 yang menjabarkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, landasan hukum utama pelaksanaan Pilkada termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tata kelola pemilu secara nasional. Pelaksanaan pemilu di wilayah ini memiliki karakteristik tersendiri, mengingat kondisi geografis yang menantang, tingkat pendidikan yang beragam, serta adanya pengaruh sosial budaya lokal yang masih sangat kuat. Kondisi tersebut menjadi faktor yang potensial memengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana demokrasi lokal telah berjalan secara substantif. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, keikutsertaan warga negara dalam proses pemilu menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (Budiardjo, 2016). pemilihan Kepala daerah (Pilkada) adalah satu mekanisme penting yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpinnya, sekaligus menjadi sarana artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat (Arifin, 2009). Namun demikian, partisipasi politik masyarakat tidak terjadi secara seragam. Berbagai faktor mempengaruhi sejauh mana warga negara terlibat dalam proses pemilu, termasuk di antaranya tingkat pendidikan, kesadaran dan minat politik, serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Ujang, 2007; Zulkarnaen, 2021). dalam studi Putnam (2000), partisipasi politik juga erat kaitannya dengan modal sosial masyarakat dan rasa keterhubungan antar individu dalam komunitas. Ketika kepercayaan terhadap sistem politik dan informasi publik rendah, maka kecenderungan apatisisme politik meningkat.

Dalam perspektif ilmu politik, partisipasi politik didefinisikan oleh Verba dan Nie (1972) sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dalam pemilu, sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum, menjadi indikator penting dalam menilai keberfungsian demokrasi, baik secara prosedural maupun substantif. Menurut Huntington dan Nelson

(1976), keberhasilan partisipasi politik tidak hanya dilihat dari kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Seberapa sadar, sukarela dan informatif partisipasi tersebut terjadi. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada bukan hanya mencerminkan seberapa besar jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, melainkan juga menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih mencerminkan legitimasi politik pemerintah daerah terpilih dan menjadi barometer efektifitas hubungan antara masyarakat, penyelenggara pemilu, serta para kandidat.

Namun demikian, berbagai tantangan struktural dan kultural di Kabupaten Mappi turut memengaruhi dinamika partisipasi masyarakat. Keterbatasan akses transportasi, infrastruktur informasi yang belum merata, serta rendahnya tingkat pendidikan di sebagian wilayah menyebabkan penyebaran informasi politik menjadi tidak optimal. Hal ini selaras dengan teori mobilization versus conversion oleh McClosky dan Dahl (1970), yang menekankan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh akses terhadap informasi serta efektifitas komunikasi politik. Faktor budaya lokal yang kuat juga memainkan peran dalam pola partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963) dalam *The Civic Culture*, nilai-nilai tradisional, struktur sosial komunal, dan kepemimpinan adat dapat memperkuat ataupun menghambat partisipasi politik, tergantung pada peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh adat dan agama. Di Mappi, sosialisasi yang tidak mengintegrasikan pendekatan budaya lokal seperti penggunaan bahasa daerah, media komunitas dan pelibatan tokoh adat cenderung kurang efektif dalam mendorong partisipasi pemilih.

Sementara itu, peran penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Berdasarkan pendekatan resource model of political participation oleh Brady, Verba dan Scholzman (1995), tersedianya sumber daya informasi, waktu, dan akses terhadap pendidikan pemilih sangat menentukan partisipasi warga negara. Dengan kata lain, efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggungjawab.

Fenomena partisipasi yang tidak merata, terutama di distrik-distrik terpencil, menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas demokrasi lokal. Beberapa laporan lapangan menunjukkan adanya ketidaktahuan masyarakat

terhadap tahapan dan kandidat Pilkada, terbatasnya distribusi informasi politik, hingga minimnya interaksi antara penyelenggara dan pemilih di tingkat akar rumput. Selain itu, mobilisasi politik oleh aktor tertentu dan keterbatasan logistik pemilu juga turut memengaruhi antusiasme masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penelitian terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Mappi menjadi penting, bukan hanya untuk memotret angka statistik kehadiran pemilih, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam perbaikan strategi sosialisasi, distribusi logistik, pendidikan pemilih, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal.

Pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika partisipasi politik di Kabupaten Mappi tidak hanya akan memperkaya diskursus ilmiah tentang demokrasi lokal, tetapi juga menjadi dasar yang kokoh bagi penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis dan budaya yang unik di Papua. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor penyebab yang memengaruhi tingginya atau rendahnya partisipasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dengan pendekatan kuantitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014) dan Sugiyono (2018), melalui analisis statistik deskriptif terhadap data responden. Fokus utama diarahkan pada tiga variabel penting, yaitu tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan efektivitas sosialisasi dari KPU sebagai penentu utama partisipasi politik. Dengan menggunakan pendekatan sistematis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan partisipasi politik di tingkat lokal

melalui perumusan strategi yang lebih inklusif dan kontekstual.

Teknik Pengumpulan Data meliputi Kuesioner (tertutup & terbuka), Wawancara singkat dengan tokoh masyarakat dan petugas pemilu serta Dokumentasi data dari KPU. Teknik Analisis Data dengan cara Statistik deskriptif, Uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel, serta Penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh masyarakat Kabupaten Mappi yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Artinya, semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mappi, mencakup berbagai kalangan: usia, gender, latar belakang pendidikan, dan distrik, yaitu DPT Kabupaten Mappi tahun 2024 berjumlah 82.154 pemilih yang menjadi populasi penelitian.

Peneliti mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel, melalui Teknik Sampling yang bisa digunakan, yaitu Random Sampling (acak sederhana), Stratified Sampling (berdasarkan distrik, usia, atau jenis kelamin) serta Purposive Sampling (jika ingin fokus pada kelompok tertentu seperti pemilih pemula, perempuan, dsb). Dari tiga Teknik sampling tersebut yang digunakan adalah Stratified Sampling (berdasarkan distrik, usia, atau jenis kelamin).

Sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 398 responden yang dipilih secara acak di beberapa distrik di Kabupaten Mappi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024

Pemilihan Serentak tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 514 (lima ratus empat belas provinsi) Daerah yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 96 (sembilan puluh enam) Kota melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 416 (empat ratus enam belas) melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Di Provinsi Papua Selatan selatan terdapat 4 Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya yaitu Kabupaten Mappi.

Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 berjumlah 82.154 (delapan puluh dua ribu seratus lima puluh empat) pemilih dengan rincian laki-laki 41.960 (empat puluh satu

ribu sembilan ratus enam puluh) Pemilih dan Perempuan 40.195 (empat puluh ribu seratus sembilan puluh lima) pemilih. Tersebar pada 15 (lima belas) Distrik dan 162 (seratus enam puluh dua kampung) dan 2 (dua) kelurahan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas presentase penggunaan hak pilih setiap pemilih di Kabupaten Mappi adalah 85% ini terlihat bahwa partisipasi sangat baik pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang mana tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Mappi sebesar 85%, tergolong tinggi dan melampaui target partisipasi nasional (77,5%). sehingga sangat perlu untuk kita analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dengan jumlah responden 398 dilihat dari faktor Tingkat Pendidikan. Berdasarkan hasil survei terhadap 398 responden, diketahui bahwa sebanyak 312 orang atau sebesar 78,4% menyatakan berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mapi Tahun 2024, sementara 86 orang atau 21,6% tidak berpartisipasi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, meskipun masih terdapat sebagian yang belum menggunakan hak pilihnya.

Salah satu faktor yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi adalah latar belakang pendidikan responden. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar pula tingkat partisipasinya dalam Pilkada. Responden yang menempuh pendidikan tinggi (perguruan tinggi) tercatat memiliki tingkat partisipasi tertinggi, yaitu sebesar 89,7%. sebaliknya, responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal memiliki tingkat partisipasi paling rendah, yaitu sebesar 60%.

Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses informasi politik lebih baik, kemampuan berpikir kritis yang lebih berkembang, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang

hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan positif antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024. temuan ini menggaribawahi pentingnya peran pendidikan dalam memperkuat partisipasi demokratis di tingkat lokal.

3. Akses Informasi Politik

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dengan jumlah responden 398 dilihat dari faktor Akses Informasi Politik. Penelitian ini mengkategorikan akses informasi politik responden kedalam tiga kelompok, yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Responden dengan akses informasi tinggi adalah mereka yang secara rutin mendapatkan informasi politik melalui berbagai saluran seperti media massa, internet, kegiatan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau diskusi di lingkungan masyarakat.

Kelompok akses sedang mencakup responden yang sesekali memperoleh informasi politik, biasanya hanya melalui media massa tanpa terlibat dalam diskusi atau kegiatan sosialisasi tatap muka. Sementara itu, kelompok dengan akses informasi rendah adalah mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemilu maupun calon kepala daerah.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 398 responden, diketahui bahwa tingkat partisipasi secara umum cukup tinggi, yakni sebesar 78,4% atau sebanyak 312 responden yang menyatakan ikut memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024. Sementara itu, sebanyak 86 responden atau 21,6% menyatakan tidak berpartisipasi dalam pemilu tersebut.

Apabila dilihat dari dimensi akses terhadap informasi politik, terdapat pola korelasi yang cukup jelas antara akses informasi dan tingkat partisipasi. Kelompok dengan akses informasi tinggi, yaitu 91,7%. Sementara itu, kelompok dengan akses sedang memiliki tingkat partisipasi sebesar 75%,

dan kelompok dengan akses rendah mencatatkan partisipasi paling rendah, yakni 68,4%.

Temuan ini memberikan indikasi kuat bahwa akses terhadap informasi politik memainkan peranan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Responden dengan akses informasi yang lebih tinggi tampaknya memiliki kesadaran politik yang lebih baik, lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta lebih terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akses seseorang terhadap informasi politik, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024. Temuan ini memperkuat pentingnya peran penyebaran informasi yang merata dan efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi di daerah, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah.

4. Peran Tokoh Adat

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dengan jumlah responden 398 dilihat dari faktor peran Tokoh Adat. Salah satu faktor yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi adalah peran tokoh adat dan tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari data yang diperoleh, responden yang menyatakan bahwa tokoh adat atau tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam memberikan arahan atau imbauan terkait pemilu, tercatat memiliki tingkat partisipasi tertinggi, yaitu 90%. Sebaliknya, responden yang menganggap bahwa tokoh adat atau agama tidak berpengaruh dalam sikap mereka, hanya 63,6% yang menyatakan ikut memilih.

Temuan ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh adat dan agama masih memegang peranan strategis dalam membentuk kesadaran politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mappi yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai komunal, kekeluargaan, dan udaya lokal. Kepercayaan terhadap tokoh adat dan agama menjadi sumber legitimasi sosial yang kuat, yang mampu mendorong keterlibatan politik masyarakat, baik melalui ajakan langsung,

penyampaian pesan moral dalam khotbah, maupun dalam forum-forum adat dan keagamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh tokoh adat atau agama dalam kehidupan masyarakat, maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya peran kepemimpinan berbasis kultural dan spiritual dalam memperkuat partisipasi politik di daerah dengan struktur sosial tradisional yang masih kuat.

5. Kepercayaan terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Mappi)

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan jumlah responden 398 orang, dilihat dari faktor Kepercayaan terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Mappi).

Salah satu variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mappi sebagai pihak penyelenggara pemilu. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap KPU menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi, yaitu sebesar 90,0%. Sebaliknya, responden yang menyatakan tidak percaya KPU atau memiliki tingkat kepercayaan rendah hanya mencatatkan tingkat partisipasi sebesar 64,8%.

Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat kepercayaan terhadap integritas dan profesionalitas KPU dengan kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tampaknya menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa proses pemilihan diselenggarakan secara jujur, adil dan transparan, maka motivasi mereka untuk ikut serta dalam pemilu cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila muncul keraguan terhadap kredibilitas KPU, masyarakat akan merasa pesimistis bahwa suara mereka akan membawa perubahan, sehingga partisipasi cenderung menurun.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap KPU Kabupaten Mappi berbanding

lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap kredibilitas lebih aktif dan bersedia menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas kelembagaan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi politik yang bermakna di tingkat daerah.

6. Jarak/tempat tinggal ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan jumlah responden 398 orang, ditinjau dari faktor jarak/tempat tinggal ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Salah satu faktor penting yang dianalisis dalam penelitian ini adalah jarak tempat tinggal pemilih terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS). hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal dekat TPS, yakni dalam radius kurang lebih 1 kilometer, memiliki tingkat partisipasi paling tinggi, yaitu 87,4%. sebaliknya, respon yang tinggal di wilayah yang cukup jauh dari TPS, yakni dengan jarak lebih dari 3 kilometer, menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah, yaitu hanya sebesar 64,8%. secara umum, terdapat pola yang jelas bahwa semakin jauh jarak tempat tinggal seseorang dari TPS, maka semakin rendah pula kemungkinan partisipasinya dalam pemilu.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa akses geografis menjadi salah satu hambatan nyata dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama wilayah-wilayah pedalaman atau kampung-kampung terpencil yang secara geografis sulit dijangkau. Faktor-faktor seperti transportasi terbatas, kondisi medan berat (seperti hutan, rawa dan sungai), serta minimnya infrastruktur jalan turut mempengaruhi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk hadir di TPS pada hari pemilihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jarak tempat tinggal ke TPS berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mappi Tahun 2024. semakin dekat lokasi tempat tinggal dengan TPS, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan penyediaan aksesibilitas pemilu yang merata, termasuk distribusi lokasi TPS

yang proporsional dengan sebaran penduduk, untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang adil dalam menggunakan hak pilihnya.

7. Minat dan Kesadaran Politik

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan jumlah responden 398 orang, dilihat dari faktor Minat dan Kesadaran Politik.

Salah satu variabel penting yang dianalisis dalam studi ini adalah tingkat minat dan kesadaran politik responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi berdasarkan tingkat kesadaran politik. Responden yang memiliki minat dan kesadaran politik tinggi menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi, yakni sebesar 92,3%. sebaliknya, responden yang menunjukkan kesadaran politik rendah hanya memiliki tingkat partisipasi sebesar 63,3%. data ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara tingkat kesadaran politik individu dengan kecenderungannya untuk menggunakan hak pilih.

Tingginya minat dan kesadaran politik tercermin dari perilaku seperti perhatian terhadap isu-isu politik, aktif mengikuti informasi pemilu melalui media, mengenali profil calon kepala daerah, serta memahami pentingnya suara dalam menentukan arah kebijakan publik. Sebaliknya, rendahnya kesadaran politik menyebabkan sebagian masyarakat bersikap apatis, kurang tertarik terhadap proses politik, dan tidak yakin bahwa suara mereka akan membawa perubahan berarti. Ketidakpedulian semacam ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi demokratis.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024. temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik dan peningkatan literasi demokrasi di kalangan masyarakat sebagai strategi kunci untuk memperkuat partisipasi pemilih dalam proses pemilu di tingkat lokal.

8. Efektivitas Sosialisasi dari KPU Kabupaten Mappi

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mappi Tahun 2024, dengan jumlah responden 398 orang, dilihat dari faktor Efektivitas Sosialisasi dari KPU Kabupaten Mappi. Salah satu faktor yang dianalisis adalah tingkat efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mappi. Data menunjukkan bahwa responden yang menilai sosialisasi KPU sangat efektif memiliki tingkat partisipasi tertinggi, yaitu 92,7%. responden yang menilai sosialisasi cukup efektif menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 75%, sementara responden yang menilai sosialisasi tidak efektif sebesar 69,4%.

Temuan ini memperlihatkan bahwa efektifitas sosialisasi pemilu memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Sosialisasi yang dialkukan secara menyeluruh, informatif, dan kontekstual yakni dengan mempertimbangkan kearifan lokal seperti penggunaan bahasa daerah, peran tokoh adat, serta media komunitas terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Sebaliknya, apabila sosialisasi dianggap tidak efektif atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka akan memunculkan keraguan, kebingungan, bahkan keengganan untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan demikian, tingkat efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mappi berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2024. semakin baik dan efektif kegiatan sosialisasi yang dilakukan, baik dari segi isi, metode, maupun jangkauan, maka semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi publik yang tepat dalam memperkuat demokrasi elektoral di tingkat lokal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kabupaten Mappi menunjukkan kecenderungan tinggi, yang berarti bahwa sebagian besar masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, meskipun belum sepenuhnya optimal. Faktor geografis, kesadaran politik, dan efektivitas distribusi informasi menjadi kendala utama. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah ke atas cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya

ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Budiardjo (2016) dan Ujang (2007).

Efektifitas sosialisasi politik penyelenggara pemilu masih belum maksimal. Sosialisasi bersifat top-down dan belum semuanya menyentuh ruang-ruang informal komunitas lokal secara strategis. Hal ini sejalan dengan temuan Zulkarnaen (2021), yang menyatakan bahwa pemilih pemula dan masyarakat pinggiran lebih membutuhkan pendekatan komunikasi politik yang partisipatif dan berbasis komunitas. Sedangkan modal sosial dan kepercayaan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (2000), menjadi kunci dalam membangun partisipasi politik yang aktif. Di kabupaten Mappi, kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan KPU masih terbatas, memengaruhi partisipasi warga dalam bentuk skeptisisme atau ketidakpedulian politik.

KPU dan lembaga terkait disarankan mengembangkan metode sosialisasi yang kontekstual dengan kultur lokal masyarakat Papua Selatan, khususnya Kabupaten Mappi. Pendekatan berbasis tokoh adat, agama, pemuda dan perempuan akan lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat akar rumput.

KPU perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, gereja, media lokal, dan tokoh masyarakat untuk membentuk jaringan advokasi demokrasi yang berkelanjutan dan tidak hanya aktif menjelang pemilu.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran etik maupun manipulasi data.

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk menggali faktor-faktor sosiokultural dan psikologis yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Papua Selatan secara lebih komprehensif.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Menakar Partisipasi Politik Lokal: Studi Pemilih Kabupaten Mappi Pada Pilkada Tahun 2024.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, A. (2009). *Partisipasi Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- KPU RI. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024*.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ujang, K. (2007). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Zulkarnaen, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 45-58.
- KPU Kabupaten Mappi. (2024). *Laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024*. Dokumen Internal, tidak diterbitkan.
- KPU Kabupaten Mappi. (2024). *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Partisipasi Pemilih per Distrik - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*. Mappi: Sekretariat KPU Kabupaten Mappi.